



Sumber Kekuasaan Dalam Negara: Analisis Berdasarkan Teori Konflik Karl Marx

Diva Raya¹, Rihan Rizky², Cucu Robiatul³, Jasmine Az-zahra⁴,
Wardatul Azizah⁵, Muhammad Rafa⁶.

Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia.

Email: divaryns21@gmail.com¹, rihanrzky@gmail.com², cucurobiatuladawiah@gmail.com³, 23jasminerana@gmail.com⁴, wardaazh24@gmail.com⁵, muhammadraffa870@gmail.com⁶

RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2024-07-05

Revised : 2024-07-25

Accepted: 2024-07-27

KEYWORD

power, conflict theory, Karl Marx, social inequality, power distribution, social conflict, literature review, social class.

KATA KUNCI

kekuasaan, teori konflik, Karl Marx, ketidaksetaraan sosial, distribusi kekuasaan, konflik sosial, studi literatur, kelas sosial.

ABSTRACT

This research aims to analyze the source of power in the state based on Karl Marx's conflict theory. The reason for this research is to understand the dynamics of unequal distribution of power and its impact on social inequality. The method used is a literature study, which involves the collection, critical evaluation, and synthesis of various relevant sources of information. The results show that power within the state is unequally distributed among social classes, with the dominant class using various mechanisms to maintain their power. As a result, this inequality triggers significant social conflicts, especially in the economic context. This research confirms the relevance of Marx's conflict theory in understanding the dynamics of power and social inequality and provides useful insights for the development of more equitable social theory and public policy.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sumber kekuasaan dalam negara berdasarkan teori konflik Karl Marx. Alasan penelitian ini dilakukan adalah untuk memahami dinamika distribusi kekuasaan yang tidak merata dan dampaknya terhadap ketidaksetaraan sosial. Metode yang digunakan adalah studi literatur, yang melibatkan pengumpulan, evaluasi kritis, dan sintesis berbagai sumber informasi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuasaan dalam negara didistribusikan secara tidak merata di antara kelas-kelas sosial, dengan kelas dominan menggunakan berbagai mekanisme untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Dampaknya, ketidaksetaraan ini memicu konflik sosial yang signifikan, terutama dalam konteks ekonomi. Penelitian ini menegaskan relevansi teori konflik Marx dalam memahami dinamika kekuasaan dan ketidaksetaraan sosial, serta memberikan wawasan yang berguna bagi pengembangan teori sosial dan kebijakan publik yang lebih adil.

1. Pendahuluan

Sumber kekuasaan dalam negara merupakan topik yang penting dan relevan dalam kajian ilmu politik dan sosiologi. Pemahaman tentang bagaimana kekuasaan didistribusikan, dipertahankan, dan diperebutkan di antara kelompok-kelompok sosial adalah kunci untuk mengerti dinamika masyarakat modern. Salah satu perspektif yang signifikan dalam menganalisis

kekuasaan adalah teori konflik, khususnya yang dikemukakan oleh Karl Marx. (Bahari, 2010) Teori ini menyoroti bagaimana ketidakseimbangan distribusi kekuasaan dan sumber daya dapat memicu konflik sosial. Pentingnya topik ini tidak hanya terletak pada pemahaman teoritis, tetapi juga pada aplikasinya dalam menganalisis fenomena sosial dan politik kontemporer. (Hendriwani, 2020)

Penelitian tentang kekuasaan dalam masyarakat telah banyak dilakukan oleh berbagai ilmuwan sosial. Karl Marx, dengan teori konflik sosialnya, menegaskan bahwa konflik kelas merupakan motor penggerak utama dalam sejarah masyarakat. Marx berpendapat bahwa distribusi kekuasaan yang tidak merata, terutama dalam konteks ekonomi, menyebabkan ketegangan antara kelas-kelas sosial yang berbeda. Max Weber juga memberikan kontribusi penting dengan menambahkan dimensi kekuasaan dan status sosial dalam analisis konflik. Penelitian-penelitian ini memberikan landasan teoritis yang kuat untuk memahami bagaimana kekuasaan dipegang dan diperebutkan dalam suatu negara.

Penelitian ini berfokus pada analisis sumber kekuasaan dalam negara berdasarkan teori konflik Karl Marx. Pertanyaan utama yang ingin dijawab adalah: bagaimana distribusi kekuasaan di antara kelas-kelas sosial dalam negara mempengaruhi dinamika sosial dan politik? Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan mekanisme yang digunakan oleh kelas dominan untuk mempertahankan kekuasaan mereka, serta dampaknya terhadap kelompok-kelompok sosial yang terpinggirkan.

Penelitian ini memiliki tujuan umum untuk mengkaji sumber kekuasaan dalam negara dari perspektif teori konflik Karl Marx. Tujuan khusus penelitian ini adalah menganalisis bagaimana kekuasaan didistribusikan di antara kelas-kelas sosial dalam negara, mengidentifikasi mekanisme yang digunakan oleh kelas dominan untuk mempertahankan kekuasaan mereka, serta menjelaskan dampak dari distribusi kekuasaan yang tidak merata terhadap kelompok-kelompok sosial yang terpinggirkan.

Penelitian ini berusaha menjawab beberapa pertanyaan kunci. Pertama, bagaimana kekuasaan didistribusikan di antara kelas-kelas sosial dalam negara? Kedua, apa mekanisme yang digunakan oleh kelas dominan untuk mempertahankan kekuasaan mereka? Ketiga, bagaimana distribusi kekuasaan yang tidak merata mempengaruhi kelompok-kelompok sosial yang terpinggirkan?

Penelitian ini penting karena dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika kekuasaan dalam negara dari perspektif teori konflik Karl Marx. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan teori sosial dan politik, serta memberikan wawasan bagi pengambil kebijakan dalam menangani isu-isu ketidaksetaraan dan konflik sosial. Selain itu, penelitian ini juga

memiliki manfaat praktis, yaitu membantu dalam merumuskan strategi untuk mengurangi ketegangan sosial dan mempromosikan keadilan sosial.

Penelitian ini akan membatasi cakupannya pada analisis sumber kekuasaan dalam negara berdasarkan teori konflik Karl Marx. Fokus penelitian akan pada distribusi kekuasaan di antara kelas-kelas sosial dan mekanisme yang digunakan oleh kelas dominan untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Penelitian ini tidak akan membahas secara mendalam aspek-aspek lain dari teori konflik atau perspektif lain dalam analisis kekuasaan. Dengan memahami latar belakang, tinjauan pustaka, pernyataan masalah, tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, signifikansi, dan batasan penelitian, kita dapat membangun dasar yang kuat untuk menganalisis sumber kekuasaan dalam negara dari perspektif teori konflik Karl Marx.

2. Metodologi

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur atau pustaka untuk menganalisis sumber kekuasaan dalam negara berdasarkan teori konflik Karl Marx. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis berbagai sumber informasi yang relevan secara sistematis, sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang topik yang diteliti. (Moeloeng, 2014)

Langkah pertama dalam metodologi ini adalah mengidentifikasi literatur yang relevan. Proses ini melibatkan pencarian artikel jurnal, buku, dan publikasi akademik lainnya yang membahas teori konflik, khususnya yang berkaitan dengan pandangan Karl Marx tentang kekuasaan dan konflik kelas. Sumber-sumber ini akan diambil dari database akademik seperti JSTOR, Google Scholar, dan perpustakaan universitas.

Setelah literatur yang relevan diidentifikasi, langkah berikutnya adalah melakukan evaluasi kritis terhadap sumber-sumber tersebut. Evaluasi ini melibatkan penilaian kualitas dan kredibilitas sumber, serta relevansinya dengan topik penelitian. Setiap sumber akan dianalisis untuk mengidentifikasi konsep-konsep kunci, temuan utama, dan argumen-argumen yang mendukung atau menentang teori konflik Marx.

Langkah ketiga adalah melakukan sintesis informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Sintesis ini bertujuan untuk mengintegrasikan temuan-temuan dari berbagai literatur menjadi narasi yang kohesif dan komprehensif. Proses ini

akan membantu mengidentifikasi pola-pola umum, kesenjangan penelitian, dan area yang memerlukan penelitian lebih lanjut.

Langkah terakhir adalah menyusun hasil sintesis dalam bentuk laporan penelitian yang terstruktur. Laporan ini akan mencakup ringkasan temuan utama, diskusi tentang implikasi temuan tersebut terhadap pemahaman tentang kekuasaan dalam negara, serta rekomendasi untuk penelitian di masa depan.

Dengan menggunakan pendekatan studi literatur, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pemahaman tentang sumber kekuasaan dalam negara berdasarkan teori konflik Karl Marx, serta memberikan wawasan yang berguna bagi pengembangan teori sosial dan politik.

3. Landasan Teori

a. Teori Konflik Sosial

Teori konflik sosial yang berkembang pada abad ke-18 dan ke-19 dapat dipahami sebagai reaksi terhadap revolusi, demokratisasi, dan industrialisasi. Teori ini muncul sebagai alternatif dari ketidakpuasan terhadap fungsionalisme struktural yang dikemukakan oleh Talcott Parsons dan Robert K. Merton, yang menilai masyarakat berdasarkan konsensus dan integralitasnya. Perspektif konflik dalam melihat masyarakat dapat dilihat pada tokoh-tokoh klasik seperti Karl Marx, Max Weber, dan George Simmel.

Teori konflik muncul sebagai reaksi terhadap teori fungsionalisme struktural yang dianggap kurang memperhatikan fenomena konflik sebagai gejala masyarakat yang perlu mendapat perhatian. Pemikiran Karl Marx sangat mempengaruhi dasar dari teori konflik ini, dan pada tahun 1950-an, teori konflik mulai berkembang lebih luas. Teori ini bertujuan untuk menganalisis asal-usul kejadian pelanggaran peraturan atau latar belakang perilaku menyimpang. Konflik menekankan sifat pluralistik masyarakat dan ketidakseimbangan distribusi kekuasaan di antara berbagai kelompok. Kelompok elit yang memiliki kekuasaan dapat menciptakan peraturan, termasuk hukum, yang melayani kepentingan mereka. (Raho, 2007)

Konflik berasal dari kata Latin "configere" yang berarti "saling memukul." Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai proses sosial antara dua orang atau lebih di mana satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. (Haryanto & Nugroho, 2011) Konflik dipicu oleh perbedaan karakteristik yang dibawa individu dalam interaksi,

seperti fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain-lain. Dengan adanya karakteristik individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar terjadi dalam masyarakat. Tidak ada masyarakat yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lain; konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.

Perspektif sosiologi memandang masyarakat sebagai sistem yang terdiri dari bagian atau komponen dengan kepentingan yang berbeda, di mana satu komponen berusaha menaklukkan kepentingan lain untuk memenuhi kepentingannya atau memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Dalam pandangan ahli sosiologi, masyarakat yang baik adalah masyarakat yang hidup dalam situasi konfliktual. Konflik sosial dianggap sebagai kekuatan utama perkembangan masyarakat yang ingin maju ke tahap yang lebih sempurna. Teori konflik sosial memandang bahwa elemen-elemen sosial memiliki kepentingan dan pandangan berbeda, yang memicu terjadinya konflik sosial yang berujung pada saling mengalahkan atau memusnahkan elemen lain.

Konflik adalah fenomena sosial yang merupakan kenyataan bagi setiap masyarakat dan akan selalu hadir dalam kehidupan sosial. Konflik bersifat inheren, artinya konflik akan selalu ada dalam setiap ruang dan waktu. Kunci memahami Marx adalah gagasannya tentang konflik sosial, yang merupakan pertentangan antara segmen-segmen masyarakat untuk merebut aset bernilai. Bentuk konflik sosial bisa bermacam-macam, seperti konflik antara individu, kelompok, atau bangsa. Marx menunjukkan bahwa potensi konflik terutama terjadi dalam bidang ekonomi, distribusi prestise/status, dan kekuasaan politik.

Konflik muncul karena adanya perbedaan dan keberagaman. Sebagai contoh, di Indonesia terdapat konflik yang terbagi secara horizontal dan vertikal. Konflik horizontal terjadi di antara anggota kelompok, seperti konflik antara suku, agama, ras, dan golongan. Konflik vertikal terjadi antara masyarakat dan pemerintah, umumnya karena ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah, seperti tuntutan kenaikan gaji buruh. Banyak konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dapat berakhir dengan kerusuhan besar jika tidak ditangani dengan cepat dan serius. Namun, konflik juga bisa membuat masyarakat bersatu jika kelompok-kelompok bawah dapat menyelesaikan masalah dengan pikiran dingin. Sebaliknya, konflik yang tidak ditangani dengan baik dapat menyebabkan

perpecahan yang merusak kehidupan masyarakat. (Turner, 1998)

Contoh konflik buruh yang menginginkan upah layak menunjukkan bagaimana konflik dapat membesar dan menimbulkan keributan jika perusahaan atau pemerintah tidak memberikan solusi yang baik dan pengertian yang dapat dipahami oleh buruh. Keputusan yang kurang bisa diterima oleh buruh dapat memperburuk situasi.

b. Pandangan Karl Marx tentang Kehidupan Sosial

Karl Marx mengemukakan beberapa pandangan penting tentang kehidupan sosial, yaitu (Poloma, 2010):

- 1) Masyarakat sebagai Arena Pertentangan:
Masyarakat dipandang sebagai tempat di mana berbagai bentuk pertentangan terjadi.
- 2) Negara sebagai Pihak dalam Pertentangan:
Negara dianggap sebagai pihak yang aktif terlibat dalam pertentangan, dengan cenderung berpihak kepada kekuatan dominan.
- 3) Peran Paksaan dalam Pemeliharaan Lembaga Sosial:
Paksaan (coercion) dalam bentuk hukum dilihat sebagai faktor utama yang menjaga lembaga-lembaga sosial seperti kepemilikan pribadi, perbudakan, dan ketidaksetaraan hak serta kesempatan.
- 4) Negara dan Hukum sebagai Alat Penindasan:
Negara dan hukum dipandang sebagai alat penindasan yang digunakan oleh kelas yang berkuasa (kapitalis) untuk keuntungan mereka sendiri.
- 5) Kelas-kelas Sosial dan Kepentingannya:
Kelas-kelas sosial dianggap sebagai kelompok dengan kepentingan yang bertentangan satu sama lain, membuat konflik menjadi sesuatu yang tak terelakkan.

Pemikiran Karl Marx berfokus pada usaha mengungkap sistem masyarakat, pola kepercayaan, dan bentuk kesadaran sebagai ideologi yang mencerminkan dan memperkuat kepentingan kelas yang berkuasa. Meski tidak seluruh kepentingan ditentukan oleh struktur kelas ekonomi, hal tersebut sangat dipengaruhi oleh struktur tersebut. Kondisi materiil dalam struktur masyarakat membatasi pengaruh budaya terhadap kesadaran individu. Beberapa aspek kenyataan sosial yang ditekankan Marx, yang tidak bisa diabaikan oleh teori apapun, meliputi pengakuan adanya struktur kelas dalam masyarakat, kepentingan ekonomi yang saling bertentangan antar kelas, pengaruh besar ekonomi

terhadap gaya hidup dan kesadaran individu, serta konflik kelas yang menghasilkan perubahan struktur sosial, yang sangat penting.

Menurut Marx, penyebab utama konflik dalam sejarah kehidupan masyarakat adalah materi atau alat produksi yang menguasai kehidupan masyarakat. Alat produksi ini menghasilkan komoditas yang diperlukan oleh masyarakat. Marx menekankan bahwa faktor ekonomi adalah yang paling penting karena konflik terjadi ketika ekonomi dijadikan alat untuk menguasai alat produksi.

Berdasarkan alat produksi, Marx membagi perkembangan masyarakat menjadi lima tahap (Goodman, 2003):

- 1) Tahap I: Masyarakat Agraris Primitif:
Alat produksi utama adalah tanah. Penindasan terjadi antara pemilik tanah dan penggarap tanah.
- 2) Tahap II: Masyarakat Budak:
Dalam masyarakat ini, budak adalah alat produksi tetapi mereka tidak memiliki alat produksi. Penindasan terjadi antara majikan dan budak.
- 3) Tahap III: Masyarakat Feodal:
Ditentukan oleh kepemilikan tanah.
- 4) Tahap IV: Masyarakat Borjuis:
Alat produksi utama adalah industri. Konflik terjadi antara kelas borjuis dan buruh. Perjuangan kelas adalah antara kelas borjuis dan kelas proletar.
- 5) Tahap V: Masyarakat Komunis:
Dalam masyarakat ini, kelas proletar akan menang.

4. Hasil dan Pembahasan

a. Perkembangan Sejarah Teori Konflik

Teori konflik berkembang sejak pertengahan abad ke-19 dengan kontribusi Karl Marx dan Max Weber. Marx menekankan perjuangan kelas dalam masyarakat kapitalis, melihat bahwa distribusi sumber daya ekonomi membentuk struktur sosial dan hubungan antar kelas. Menurut Marx, konflik antara borjuasi (pemilik alat produksi) dan proletariat (kelas pekerja) mendorong perubahan sosial saat kaum proletar berusaha menggulingkan borjuasi untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil. Weber memperluas teori ini dengan memperhatikan perebutan kekuasaan yang melibatkan berbagai identitas sosial seperti ras, gender, dan status sosial. Weber menyoroti peran institusi sosial dalam mempertahankan atau menantang struktur kekuasaan. Secara keseluruhan, perkembangan teori konflik mencakup perjuangan

kelas menurut Marx dan perebutan kekuasaan berdasarkan identitas sosial menurut Weber, yang keduanya mempengaruhi pemahaman konflik sosial dan ketidaksetaraan dalam masyarakat modern. (Suseno, 2003)

b. Teori Konflik dalam Struktur Sosial

Teori Konflik adalah perspektif sosiologi yang melihat masyarakat melalui persaingan dan ketidaksetaraan di antara kelompok sosial. Menurut teori ini, struktur sosial dibentuk oleh dinamika kekuasaan dan konflik yang timbul dari distribusi sumber daya dan status sosial yang tidak merata. Masyarakat dianggap penuh dengan perjuangan dan konflik, di mana berbagai kelompok bersaing untuk sumber daya, hak istimewa, dan peluang yang terbatas, menciptakan dan mempertahankan kesenjangan sosial. Ketimpangan ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari struktur sosial. Mereka yang berkuasa memanfaatkan pengaruh mereka untuk mempertahankan keunggulan, sementara kelompok dengan kekuasaan dan sumber daya lebih kecil berjuang untuk mendapatkan akses. (Hendriwani, 2020) Teori Konflik menyoroti ketidakseimbangan kekuasaan dan mendorong perubahan sosial. Melalui perspektif ini, kita dapat memahami mekanisme yang melanggengkan kesenjangan dan cara menciptakan masyarakat yang lebih adil.

c. Penyebab Konflik

Teori konflik mengidentifikasi beberapa penyebab utama konflik dalam masyarakat. Pertama, struktur dan institusi sosial seperti ekonomi dan politik memelihara kesenjangan sosial, memicu persaingan untuk sumber daya dan hak istimewa yang terbatas. Kedua, dinamika kekuasaan, di mana kelompok yang berkuasa menggunakan pengaruhnya untuk mempertahankan keunggulan dan menekan kelompok terpinggirkan, berkontribusi terhadap konflik. Selain itu, perjuangan kelas dalam masyarakat kapitalis menciptakan dan mempertahankan kesenjangan sosial, yang berujung pada konflik antara kelas dominan dan kelas pekerja. Kesenjangan dan ketidakadilan sosial juga dapat memicu konflik saat kelompok marginal berusaha menantang dan mengubah status quo. Jadi, penyebab konflik meliputi struktur sosial, dinamika kekuasaan, perjuangan kelas, dan kesenjangan sosial yang semuanya berkontribusi terhadap konflik dalam masyarakat. (Nendissa, 2022)

d. Struktur Sosial dan Dinamika Kekuasaan

Teori konflik menekankan pentingnya struktur dan institusi sosial dalam mempertahankan konflik. Institusi ekonomi dan politik, khususnya, memainkan peran besar dalam menciptakan dan memelihara kesenjangan sosial. Ini menyebabkan persaingan ketat untuk sumber daya dan hak istimewa yang terbatas, di mana mereka yang berkuasa menggunakan pengaruh mereka untuk mempertahankan posisi menguntungkan, sambil menekan kelompok-kelompok terpinggirkan. Perebutan kekuasaan dan akses terhadap sumber daya menjadi sumber utama konflik. Struktur sosial menciptakan dan memelihara kesenjangan, sementara dinamika kekuasaan memperkuat konflik. Persaingan untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas adalah salah satu pemicu utama konflik. (Suseno, 2003)

e. Perjuangan Kelas dan Ketimpangan Sosial

Teori konflik menyatakan bahwa masyarakat kapitalis secara alami menimbulkan kesenjangan sosial, yang menyebabkan konflik antara kelas dominan dan kelas pekerja. Perjuangan ini muncul dari distribusi sumber daya dan peluang yang tidak merata, yang mengakibatkan perpecahan sosial dan konflik berkelanjutan. Ketidakadilan sosial memperburuk konflik ini, seiring kelompok marginal berusaha mengubah status quo. (Permata, 2001) Dalam pandangan Marx, sejarah masyarakat adalah sejarah perjuangan kelas, dengan kelas sosial sebagai aktor utama. Alienasi manusia terjadi akibat penindasan satu kelas oleh kelas lainnya. Marx mengkategorikan masyarakat berdasarkan teknologi dan pembagian kerja, mengidentifikasi konflik antar kelas sebagai penentu struktur sosial sepanjang sejarah.

Marx mengartikan kelas sebagai kelompok individu dengan posisi serupa dalam kepemilikan alat produksi, membagi masyarakat ke dalam kelas kapitalis (borjuis) dan kelas pekerja (proletar). Kelas borjuis mengendalikan produksi, sementara proletar menjual tenaga kerja mereka tanpa memiliki alat produksi. Kapitalisme didominasi oleh nilai-nilai yang dihasilkan dari pertukaran komoditas, mengatur hubungan sosial dalam masyarakat tersebut. Industrialisasi memperparah alienasi manusia, di mana pekerjaan kehilangan makna bagi pekerja. (Bahari, 2010)

Marx menekankan perlunya pembebasan manusia dari alienasi ini. Dalam *The Communist Manifesto*, Marx dan Engels menyatakan bahwa sejarah manusia adalah sejarah perjuangan antar kelas. Konflik antara borjuis dan proletariat adalah

inti dari masyarakat modern. Meski tampak stabil, hubungan kerja dalam sistem kapitalis mengandung konflik tak terhindarkan. Borjuis cenderung mempertahankan kekuasaan, sementara proletariat berusaha membebaskan diri dari penindasan.

Marx menyalahkan struktur kelas yang menghambat kebebasan individu, menganggap hukum hanya melayani kepentingan kelas penindas. Keadilan sosial, menurut Marx, terwujud ketika alat produksi dimiliki bersama. Kapitalisme, yang mendorong kepentingan pribadi, menciptakan kesenjangan dan konflik. Marx percaya bahwa ketegangan kelas dalam masyarakat kapitalis akan mendorong proletariat untuk merebut kekuasaan politik dan menciptakan masyarakat tanpa kelas. (Yuniar, 2021)

Kritik ideologi adalah salah satu kontribusi penting Marx, yang menyoroiti bagaimana ideologi kapitalis melegitimasi ketidakadilan. Materialisme historis Marx memprediksi bahwa kapitalisme akan mengalami konflik internal yang mengarah pada kehancuran dan digantikan oleh sosialisme. Marx percaya bahwa kelas pekerja harus melakukan revolusi untuk mencapai pembebasan sosial-ekonomi.

Dalam pandangan Marx, keadilan berarti kepemilikan bersama atas alat produksi yang hanya bisa dicapai melalui revolusi. Revolusi, bagi Marx, adalah transformasi struktur sosial yang menggulingkan kelas penguasa untuk mendominasi proletariat. Pandangan Marxisme-Leninisme menganggap revolusi membutuhkan partai revolusioner yang mempersatukan unsur-unsur revolusioner untuk mencapai sosialisme. Namun, tanpa solidaritas internasional yang kuat, proses ini sulit terwujud. Beberapa negara sosialis besar seperti Uni Soviet dan RRC telah beralih ke kapitalisme karena tidak mampu melawan serangan ekonomi-politik globalisasi. (Kambali, 2017)

Marx mengkritik negara liberal yang melindungi kepentingan kelas borjuis, dan menekankan bahwa hanya dalam masyarakat tanpa kelas, hukum dapat melayani kehendak bebas masyarakat. Marx menyatakan bahwa keadilan sosial tergantung pada struktur kekuasaan yang menentukan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dengan mengemukakan konsep materialisme historis, Marx memprediksi bahwa kapitalisme akan digantikan oleh sosialisme, di mana proletariat mengambil alih kekuasaan dan menciptakan masyarakat tanpa kelas. Marx mendukung revolusi untuk menjatuhkan kapitalisme dan mencapai pembebasan sosial-ekonomi. (Mansyur et al., 2022)

Kritik Marx terhadap ideologi kapitalis menyoroiti bagaimana ideologi melegitimasi ketidakadilan. Materialisme historis Marx memprediksi bahwa kapitalisme akan mengalami konflik internal yang mengarah pada kehancuran dan digantikan oleh sosialisme. Marx percaya bahwa ketegangan kelas dalam masyarakat kapitalis akan mendorong kelas pekerja untuk merebut kekuasaan politik dan menciptakan masyarakat tanpa kelas. Marx menyatakan bahwa revolusi adalah transformasi struktur sosial yang menggulingkan kelas penguasa untuk mendominasi proletariat. Pandangan Marxisme-Leninisme menganggap revolusi membutuhkan partai revolusioner yang mempersatukan unsur-unsur revolusioner untuk mencapai sosialisme. (Tucker, 2022)

Namun, tanpa solidaritas internasional yang kuat, proses ini sulit terwujud. Beberapa negara sosialis besar seperti Uni Soviet dan RRC telah beralih ke kapitalisme karena tidak mampu melawan serangan ekonomi-politik globalisasi. Marx mengkritik negara liberal yang melindungi kepentingan kelas borjuis, dan menekankan bahwa hanya dalam masyarakat tanpa kelas, hukum dapat melayani kehendak bebas masyarakat. Marx menyatakan bahwa keadilan sosial tergantung pada struktur kekuasaan yang menentukan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dengan mengemukakan konsep materialisme historis, Marx memprediksi bahwa kapitalisme akan digantikan oleh sosialisme, di mana proletariat mengambil alih kekuasaan dan menciptakan masyarakat tanpa kelas. Marx mendukung revolusi untuk menjatuhkan kapitalisme dan mencapai pembebasan sosial-ekonomi.

5. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa analisis sumber kekuasaan dalam negara berdasarkan teori konflik Karl Marx memberikan wawasan yang mendalam tentang dinamika kekuasaan dan ketidaksetaraan sosial. Teori konflik Marx menunjukkan bahwa distribusi kekuasaan yang tidak merata, terutama dalam konteks ekonomi, merupakan sumber utama konflik sosial. Kelas dominan menggunakan kekuasaan mereka untuk mempertahankan kepentingan mereka, seringkali dengan mengorbankan kelas-kelas yang lebih lemah.

Penelitian ini mengungkap bahwa mekanisme yang digunakan oleh kelas dominan untuk mempertahankan kekuasaan mereka melibatkan pengendalian alat produksi, pembuatan hukum yang

menguntungkan mereka, dan penggunaan aparatus negara sebagai alat penindasan. Selain itu, analisis ini juga menunjukkan bahwa konflik sosial adalah fenomena yang inheren dalam masyarakat yang berstratifikasi, di mana setiap kelas berusaha untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhannya sendiri.

Implikasi dari temuan ini adalah bahwa ketidaksetaraan sosial dan konflik kelas harus dilihat sebagai aspek fundamental dalam struktur sosial, yang memerlukan perhatian serius dalam kebijakan publik dan reformasi sosial. Hasil penelitian ini dapat memberikan landasan teoritis yang kuat untuk penelitian-penelitian selanjutnya dalam bidang sosiologi dan ilmu politik, serta membantu dalam merumuskan strategi untuk mengurangi ketegangan sosial dan mempromosikan keadilan sosial.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan relevansi teori konflik Marx dalam memahami dinamika kekuasaan dalam negara dan menggarisbawahi pentingnya distribusi kekuasaan yang lebih adil untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan harmonis. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori sosial, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan dalam upaya menciptakan perubahan sosial yang positif.

6. Daftar Pustaka

- Bahari, Y. (2010). Karl Marx: Sekelumit tentang hidup dan pemikirannya. *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora*, 1(1), 375.
- Goodman, G. R., & Goodman, D. J. (2003). *Teori sosiologi modern*. Kencana.
- Haryanto, D., & Nugroho, G. E. (2011). *Pengantar sosiologi dasar*. PT. Prestasi Pustakarya.
- Hendriwani, S. (2020). Teori kelas sosial dan Marxisme Karl Marx. *Paradigma: Jurnal Kalam dan Filsafat*, 2(1), 47.
- Kambali, M. (2017). Kritik ekonomi Islam terhadap pemikiran Karl Marx tentang sistem kepemilikan dalam sistem sosial masyarakat. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2).
- Mansyur, R. P. C., Anshari, A., & Saguni, S. S. (2022). The phenomenon of capitalism in the novels of People, Projects by Ahmad Tohari: Review of the sociology of literature by Karl Marx. *Pinisi Journal of Art, Humanity, and Social Studies*, 5(2), 214.
- Moeloeng, L. J. (2014). *Metodologi penelitian studi literatur: Edisi revisi*. Remaja Rosdakarya Offset.

- Nendissa, J. E. (2022). Teori konflik sosiologi modern terhadap pembentukan identitas manusia. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 4(3), 69.
- Permata, H. (2001). Filsafat dan konsep negara Marxisme. *Jurnal Filsafat*, 21(3).
- Poloma, M. (2010). *Sosiologi kontemporer*. PT RajaGrafindo Persada.
- Raho, B. (2007). *Teori sosiologi modern*. Prestasi Pustaka Publisher.
- Suseno, F. M. (2003). *Pemikiran Karl Marx: Riwayat hidup*. Gramedia.
- Tucker, C. W. (2022). Intergroup conflict resolution in Markum Village and Tupoplyo Village Okbab District, Mountain Bintang District. *ENDLESS: International Journal of Future Studies*, 5(2), 1–12.
- Turner, J. H. (1998). *The structure of sociological theory*. Wadsworth Publishing Company.
- Yuniar, R. A., & V. S. (2021). Social justice in law, society and development: A Marxism perspective of Indonesian case. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(1), 1–15.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).